

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI  
DOMAIN NAME DALAM E-COMMERCE**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

OLEH

**MOH MAKRUH**  
NIM: 039914908

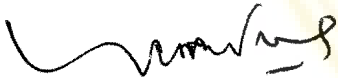
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

# **ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI DOMAIN NAME DALAM E-COMMERCE**

## **SKRIPSI**

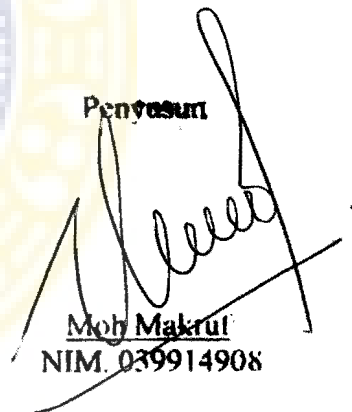
Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing



Nurul Barizah, S.H., L.L.M  
NIP. 132133945

Penyusun



Moh. Makruf  
NIM. 039914908

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal: 4 Maret 2004.

Panitia Penguji Skripsi :

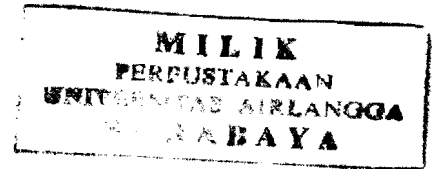
Ketua : Wuri Adrijani, S.H., M.H

Anggota : 1. Nurul Barizah, S.H., L.LM

2. Hj. Mas Rahmah, S.H, M.H

## BAB IV

### PENUTUP



#### 1. Kesimpulan

- a. Antara domain name dan merek dapat dibedakan dengan tegas, perbedaan ini didasarkan pada faktor sistem yang berlaku didalam pendaftaran nama domain dan beberapa sifat nama domain itu sendiri sehingga dapat dibedakan dengan merek. Perbedaan itu adalah :

No.	Nama Domain	Merek
1.	Eksistensinya adalah sebagai alamat dan nama dalam sistem jaringan komputer dan telekomunikasi.	Eksistensinya berfungsi sebagai daya pembeda dalam lingkup perindustrian dan perdagangan.
2.	Lebih bersifat sebagai amanat yang diberikan oleh masyarakat hukum pengguna internet ketimbang sebagai suatu <i>property</i> .	Lebih bersifat <i>property</i> karena merupakan kreasi intelektual manusia yang dimintakan haknya kepada negara untuk kepentingan industri dan perdagangan.
3.	Asasnya adalah berlaku <i>first come first served</i> .	Asasnya ada yang menganut <i>first to filed</i> dan ada yang menganut <i>first to used</i> .
4.	Tidak adanya pemeriksaan substantif.	Harus ada pemeriksaan substantif
5.	Sepanjang tidak dapat dibuktikan beritikad tidak baik, maka perolehan nama domain bukanlah tindak pidana	Sepanjang tidak diberikan lisensi oleh yang berhak maka penggunaan merek adalah pelanggaran.

- b. Penyelesaian sengketa nama domain dapat menggunakan cara penyelesaian dengan gugatan perdata, tuntutan pidana ataupun alternatif penyelesaian sengketa (*alternative disputes resolution-ADR*),

dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa. Sebagaimana digariskan oleh Prosedur penyelesaian sengketa nama domain di dunia internasional yang dibuat oleh ICAANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) yang disebut *Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* (UDRP) yaitu penyelesaiannya dapat menempuh jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (PSA), yakni dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (*resolved by the parties themselves*) atau arbitrase yang di-approved oleh ICANN's (*approved dispute resolution provider*) atau melalui mekanisme peradilan umum (*the court*) dan dapat pula melalui lembaga-lembaga pengambil keputusan keadilan lain yang dikenal secara hukum.

## 2. Saran

- a. Mengingat sampai saat ini belum adanya pengaturan khusus akan permasalahan tersebut diatas, maka perlu adanya kehati-hatian bagi masyarakat pemakai domain name dan juga bagi perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet. Prinsip kehati-hatian juga perlu diterapkan dalam pendaftaran domain name. dalam pendaftaran domain name sudah seharusnya penyedia jasa internet memasukkan syarat-syarat tertentu yang diperlukan apakah nama yang dipakai sebagai domain name bukan merupakan trade mark pihak lain, atau sebaliknya bahwa nama domain yang didaftarkan merupakan trade mark yang menjadi haknya yang sudah terdaftar di Dirjen HAKI.

Prosedurnya dapat dengan meminta salinan berkas surat sertifikat merek, SIUP bagi perusahaan, KTP untuk perseorangan, dll. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa nama domain yang digunakan tidak melanggar hak orang lain. Dalam memahami tulisan ini diperlukan Undang-undang Merek sebagai acuan untuk mendefinisikan merek itu sendiri, pendaftarannya, bentuk perlindungannya, dll. Yang telah diatur dalam undang-undang merek.

- b. Dalam penyelesaian sengketa nama domain, sebaiknya mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa nama domain di dunia internasional yang dibuat oleh ICAANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) yang disebut *Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* (UDRP). yaitu penyelesaiannya dapat menempuh jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (PSA), yakni dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (*resolved by the parties themselves*) atau arbitrase yang di-approved oleh ICANN's (*approved dispute resolution provider*) atau melalui mekanisme peradilan umum (*the court*) dan dapat pula melalui lembaga-lembaga pengambil keputusan keadilan lain yang dikenal secara hukum. Prosedur ini perlu dicantumkan dalam UU Cyber atau UU tentang pemanfaatan teknologi Informasi yang akan dibentuk oleh Indonesia.